

ABSTRAK

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang merupakan hal yang sangat menentukan. Kepailitan dapat kehilangan esensinya tanpa adanya utang yang merupakan pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang luas mengakibatkan timbulnya permasalahan yang sering terjadi. Dalam pengajuan permohonan pailit terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan memiliki setidaknya dua kreditor yang secara tegas terdapat dalam pasal 2 Ayat (1). Utang dalam kepailitan adalah utang prestasi bukan hanya utang dalam bentuk uang sebagai akibat dari perjanjian utang piutang. Salah satunya dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi.

Dalam pelaksanaannya permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang yang timbul akibat wanprestasi, dalam hal ini kerjasama konstruksi masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan norma dan prinsip utang. Sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan akan kepastian hukum pada kreditor. Sehingga, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan prinsip utang yang ada pada peradilan di Indonesia serta mengetahui status kerjasama apabila dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat putusan pailit.

Kata Kunci : Utang, Kepailitan, Wanprestasi.

ABSTRACT

In the mechanism of bankruptcy law, the concept of debt is very decisive. Bankruptcy can lose its essence in the absence of debt which is a legal order to liquidate the debtor's assets to repay his debts to creditors. The definition of debt in Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 of Debt that wide resulted in the occurrence of problems that often occur. In the filing of a bankruptcy application there is a material requirement that must be met, namely the existence of debt due and having at least two creditors that are explicitly contained in Article 2 Paragraph (1). Debt in bankruptcy is a debt of achievement not just debt in the form of money as a result of debt agreement receivable. One of them by not executing the achievement or obligation as it should be an act of breach.

In the implementation of bankruptcy applications based on debt arising from default, in this case construction cooperation there is still inconsistency in the application of norms and principles of debt. So that raises a vagueness of legal certainty to creditors. Thus, this thesis aims to determine the application of norms and principles of debt that exist in the judiciary in Indonesia and know the status of cooperation if in the implementation of such cooperation there is a decision bankruptcy.

Keywords: Debt, Bankruptcy, Breach.